

NOTULEN SESI III
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019
JAKARTA, 25 – 27 MARET 2019

Tema :
“TRANSFORMASI DAN KESIAPAN PERHUBUNGAN DARAT UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME KINERJA MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

Moderator :
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Antar Moda

Narasumber :

1. Direktur Lalu Lintas Jalan

- a. Status TIK Lalu Lintas Jalan dalam mendukung Revolusi Industri 4.0 :
 - 1) 49 CCTV untuk *Status Traffic Surveillance* yang juga dapat difungsikan sebagai *Traffic Sensor/Traffic Counting*
 - 2) Status Trafic Counting Sistem
 - 3) VMS (Variable Message Sign)
 - 4) Status RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) yang terintegrasikan dengan CCTV dan Juga Media Sosial
 - 5) RTTMC selanjutnya akan dikembangkan melalui pengintegrasian aplikasi eksisting dengan TIK Perhubungan Darat dan TIK Pustikom
- b. Aplikasi E-Tilang yang terintegrasikan dengan Bank, Korlantas, Pengadilan Kejaksaan, Dukcapil dan dapat di Akses melalui Mobile (Android & IOS)
- c. Database perlengkapan jalan yang sudah dibuat melalui system website, untuk mempermudah pendataan/pencarian data perlengkapan jalan dari seluruh Indonesia;
- d. Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan Online sehingga badan usaha dapat mendaftarkan Perusahaannya dengan mengakses website;

2. Direktur Sarana Transportasi Jalan

- a. Semua kendaraan baru yang lahir dari karoseri dipastikan sesuai dengan aturan;
- b. Saat ini sulit untuk mendapatkan STNK tanpa SRUT karena data antara STNK dan SRUT telah terintegrasikan (Kemenhub dan Korlantas)
- c. SRUT direncanakan tidak akan menggunakan kertas, melainkan menggunakan E – Certificate, dengan tujuan :
 - 1) Kurang Efektif dalam proses menunggu print out
 - 2) Mengurangi Investasi printer;
 - 3) Meminimalisir ruang penyimpanan blangko SRUT
- d. Rencana Program Kerja Uji Berkala :
 - 1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2) Kalibrasi Peralatan Uji;
 - 3) Sertifikasi Kompetensi Penguji;
 - 4) Bukti Lulus Uji Berkala kendaraan Elektronik;
 - 5) Unit Pelaksana Uji Berkala Swasta;
- e. Tahun 2020 PKB di daerah secara online harus terintegrasi dengan Dit Sarana Transportasi Jalan;
- f. Saat ini ada 140 Kab/Kota yang sudah terintegrasi dengan Dit Sarana Transportasi Jalan;
- g. Dit Sarana Transportasi Jalan telah melimpahkan wewenang kalibrasi kepada BPTD di daerah;
- h. Terkait Pengujian Swasta, Dit Sarana Transportasi Jalan melakukan pilot project dengan mengkalibrasi pengujian Bluebird dan Hiba yang diasistensi oleh Dishub Prop DKI Jakarta;
- i. Peralihan dari Buku Uji diarahkan untuk menggunakan sistem BLUE;

- j. Alat Pemantul Cahaya Tambahan dasar hukum akan segera terbit. Alat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jenis kecelakaan tabrak belakang;
- k. Pelaksanaan SMK Perusahaan Angkutan Umum, Dit Sarana Transportasi Jalan membina operator untuk dapat mengetahui standar keselamatan dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat;
- l. Program kegiatan unggulan bidang Sarana Transportasi Jalan antara lain
 - 1) Implementasi Batas Kecepatan;
 - 2) ZoSS;
 - 3) Kampanye Keselamatan dan SALUD;
 - 4) Akreditasi UPUBKB dan Rencana BLUE;
 - 5) RASS;
 - 6) Taman Edukasi;
 - 7) E-SRUT;
 - 8) Peningkatan Kompetensi/Kapasitas SDM Bidang Sarana Transportasi Jalan.

3. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

- a. Tantangan yang dihadapi Dit Prasarana Transportasi butuh konsep ke depan yaitu :
 - 1) Penyelesaian masalah yang ada;
 - 2) Sinergi regulasi;
 - 3) Kekurangan SDM, Anggaran, serta sistem dan teknologi.
- b. Pengembangan sistem prasarana Transportasi Jalan sebagai berikut :
 - 1) Stand Alone;
 - 2) City Hub
 - 3) TOD
 - 4) Fasilitasi Integrasi
 - 5) Rest Area
 - 6) Terminal Barang Internasional;
 - 7) Pembangunan UPPKB di Kawasan industry, pintu tol, dan Pelabuhan Penyeberangan.
- c. Penanganan ODOL target dalam 3 tahun tuntas. Target 2021 Indonesia bebas ODOL.
- d. Sebagai akselerasi penuntasan ODOL melalui :
 - 1) Regulasi
 - 2) SDM;
 - 3) Sarana;
 - 4) Prasarana;
 - 5) Pengawasan.
- e. Dit Prasarana Transportasi Jalan memiliki Subdit Bimbingan Kepengusahaan untuk penyelesaian permasalahan anggaran yang dimiliki dalam pembangunan prasarana transportasi jalan. Pembangunan prasarana dapat menggunakan konsep kerjasama dengan berbagai bentuk antara lain KPBU, KSP, KSPI, Sewa, Pinjam Pakai, maupun BGS/BSG.

4. Direktur Angkutan Jalan

- a. Menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 pertama yang harus dilakukan adalah Deregulasi terkait kebijakan di bidang Angkutan Jalan;
- b. Beberapa perbaikan regulasi yang telah dilakukan yaitu
 - 1) Sistem Perizinan Angkutan;
 - 2) ASK dan Ojol yang telah diberlakukan;
 - 3) Perhitungan biaya jasa ASK;
 - 4) Angkutan tidak dalam trayek;
 - 5) Angkutan dalam trayek;
 - 6) Angkutan barang antisipasi angkutan logistik online;
- c. Perbaikan pada system perizinan online sehingga dapat memangkas waktu perizinan semula 7 hari menjadi 3 hari melalui SPIONAM;
- d. E-logbook (sistem pengawasan waktu kerja pengemudi angkutan umum) diwajibkan sebagai persyaratan perizinan angkutan;

- e. Dit Angkutan Jalan merencanakan untuk membuat big data perizinan angkutan dimana didalamnya terdapat system manajemen keselamatan, pelayanan (e-tiket bus dan pelabuhan) dan pengawasan serta penindakan.
- f. Dit Angkutan Jalan menyelenggarakan layanan angkutan perintis, angkutan perkotaan dan pengadaan bus sekolah dengan ukuran lebih kecil sehingga dapat menjangkau ke daerah pedesaan. Dit Angkutan Jalan menampung usulan dari daerah.

5. Direktur Transportasi SDP

- a. Langkah awal dilakukan Dit TSDP adalah deregulasi bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Tugas yang cukup berat di Dit TSDP adalah deregulasi bidang keselamatan pelayaran;
- c. Tantangan yang dihadapi selain regulasi adalah kebutuhan SDM dan kelembagaan;
- d. Isu-isu strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program TSDP yaitu :
 - 1) Regulasi dan Kebijakan;
 - 2) SDM;
 - 3) Kelembagaan;
 - 4) Pendanaan;
 - 5) Sarana dan Prasarana;
 - 6) Teknologi dan Informasi;
 - 7) Manajemen implementasi;
 - 8) Kinerja.
- e. Evaluasi keperintisan angkutan penyeberangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2019 terdiri atas 228 lintas. Direncanakan tahun 2020 akan dilaksanakan subsidi MYC selama 5 tahun.
- f. Program unggulan TSDP yaitu :
 - 1) Manajemen Keselamatan Angkutan Danau di KSPN Danau Toba;
 - 2) Manajemen Keselamatan Transportasi Sungai di Kawasan Jembatan Ampera.

Diskusi :

No	Penanya (Nama/Instansi)	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Rusdiansyah Kadishub Prop Kalsel	Dalam penertiban ODOL tidak mudah, saran : 1. Alat ukur UPPKB harus sudah selesai semua 2. Harus ada komitmen dengan Kepolisian dalam bentuk MoU di tingkat Pimpinan (pusat) agar tidak terjadi perselisihan di lapangan.	1. Terima kasih atas masukan dan sarannya. 2. Dari Dit Prasarana Transportasi Jalan sedang dalam proses penyusunan MoU dengan Kepolisian
2.	Aksan Kadishub Polman Sulbar	1. Belum ada PKB di Sulsel dan Sulbar terakreditasi, Polman sudah bersurat untuk kalibrasi ke BPTD agar dapat segera dikalibrasi. 2. Penyerahan Aset terminal Tipe A Polman, dimohon agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.	1. Permohonan kalibrasi akan segera ditindaklanjuti; 2. Terkait penyerahan asset terminal POLman akan segera ditindaklanjuti oleh Dit Prasarana Transportasi Jalan.

3.	Dishub Morowali Utara Sulteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Pelabuhan Penyeberangan Kolonadale dan Baturube, posisi masih BASTO, mengusulkan pemeliharaan; 2. Penandatanganan SPB apa bisa dari Pemda mengeluarkan SPB karena di Syahbandar terkesan lambat; 3. ODOL dapat dilaksanakan. Agak berat pada Overload, agar JT portable dapat didistribusikan ke Kab/Kota; 4. Amdalalin menjadi BOM waktu terkait kewenangan Jalan Nasional di Daerah karena Dishub tidak dapat berbuat apa-apa. 5. Terkait retribusi perijinan yang dikeluarkan oleh Kab/Kota agar dapat ditertibkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset yang dikelola oleh Pemda harus diserahkan terlebih dahulu ke pusat.; 2. UU 23 2014 tentang Otoda, terkait Kes Pel adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat. 3. Terkait Overload alat ukur muatan akan didistribusikan kepada pemerintah daerah. 4. Yang membuat dokumen Andalalin bukan Dishub melainkan Konsultan yang bersertifikat. Persetujuan dikeluarkan sesuai kewenangannya. 5. Dicek dengan cermat landasan hukum pelaksanaan retribusi di daerah karena jika tidak benar akan berdampak buruk bagi personil di lapangan.
	Dishub Gresik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dari Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan aplikasi untuk angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek untuk menyamai aplikasi ASK; 2. Terkait ASDP, apakah Kementerian bisa mengembangkan aplikasi terkait manifest angkutan penyeberangan; 3. Terkait sinkronisasi antara angkutan jalan, rel dan laut apakah ada rencana untuk angkutan barang dipindah ke laut atau kereta sehingga tidak membebani jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan perkotaan sedang disiapkan sistem manajemen angkutan umum tersendiri, pelayanan AKAP akan dibuatkan untuk bergabung dengan SPIONAM. 2. Terkait manifest, sudah merupakan program Dit TSDP melalui E-Ticketing sehingga akan lebih terjamin keselamatan penumpang; 3. Dit TSDP telah memiliki program LDF untuk mengurangi beban jalan dari Jakarta ke Surabaya.
	Dishub Kab Sikka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimohon untuk dapat di kalibrasi PKB di Kabupaten Sikka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan segera ditindak lanjuti

Jakarta, Maret 2019

NOTULEN

1.

2.